



Afiliasi Politik Dewan Komisaris dan Direksi Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Arief Nurhandika^{1)*}; Chintia Fitriani²⁾; Iman Teguh³⁾; Faishal Rahimi⁴⁾
Email Korespondensi: arief.nurhandika@uniku.ac.id

Akuntansi, Universitas Kuningan, Kuningan, Indonesia^{1,2,3)}
Manajemen, Universitas Kuningan, Kuningan, Indonesia⁴⁾

INFO ARTIKEL

Proses Artikel

Dikirim : 15/05/2024

Diterima: 12/07/2024

Dipublikasikan: 31/07/2024

Akreditasi oleh
Kemenristekdikti
No.79/E/KPT/2023

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh afiliasi politik pada dewan komisaris dan afiliasi politik direktur terhadap skor CSR. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan purposive sampling method dalam pengambilan sampelnya. Sampel penelitian ini adalah *Indonesia Stock Exchange Industrial Classification* sektor D yaitu *consumer non-cyclicals* dari periode 2017-2022. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Penelitian ini menggunakan software STATA untuk analisis statistik. Populasi yang digunakan sebesar 17 perusahaan dan di dapat 102 sampel observasi untuk dianalisis. Hasil penelitian menemukan bahwa dewan komisaris yang berafiliasi politik berpengaruh positif terhadap skor CSR. Namun pada variabel dewan direksi yang berafiliasi politik tidak berpengaruh terhadap skor CSR. Implikasi pada penelitian ini memberikan gambaran bagaimana perusahaan atau praktisi menyikapi koneksi politik dapat selaras dengan tingkat nilai CSR dengan memperhatikan keadaan sosial seperti terjadinya covid-19, pemilu, dan hal lain yang menyangkut aturan - aturan baru pemerintah tentang pertanggungjawaban sosial. Penelitian ini tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan pertama adalah data yang diambil masih pada satu sektor saja mungkin penelitian selanjutnya menggunakan sektor lain agar mampu menggambarkan keadaan disektor lain atau sebagai pembanding, kedua penelitian ini masih pada dua variabel independen yang belum mencerminkan keseluruhan koneksi politik mungkin penelitian selanjutnya menambahkan lebih spesifik koneksi politik seperti militer dan mantan menteri.

Kata Kunci :

Afiliasi Politik Dewan Komisaris, Afiliasi Politik Dewan Direksi, CSR, STATA.

Abstract

The objective of this study is to examine the impact of political affiliation within the board of commissioners and the directors on

Corporate Social Responsibility (CSR) scores. This research is quantitative in nature and employs purposive sampling for sample selection. The sample for this study comprises companies from the Consumer Non-Cyclicals sector within the Indonesia Stock Exchange Industrial Classification, spanning the period from 2017 to 2022. Panel data regression analysis is used for this research, with statistical analysis conducted using STATA software. The population includes 17 companies, resulting in 102 observational samples for analysis. The findings of the study indicate that political affiliation within the board of commissioners has a positive impact on CSR scores. However, political affiliation within the board of directors does not affect CSR scores. The implications of this research provide insights for companies and practitioners on how political connections can align with CSR values by considering social conditions such as the occurrence of COVID-19, elections, and new government regulations regarding social responsibility. This study acknowledges certain limitations. Firstly, the data is limited to a single sector; future research could include other sectors to provide a more comprehensive comparison. Secondly, this study focuses on only two independent variables, which may not fully represent the entirety of political connections. Future research could include more specific political connections, such as military affiliations or former ministers, to enhance understanding.

Key words:

Political Affiliation Of The Board Of Commissioners, Political Affiliation Of The Board Of Directors, CSR, STATA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) telah menjadi dasar konseptual di mana para akademisi dan praktisi mempertimbangkan apakah menerapkan CSR bermanfaat bagi kepentingan bisnis. (Aboud & Yang, 2022; García-Sánchez et al., 2022; Jiao et al., 2022; Rianda, 2023). Menurut Gupta et al. (2017) Literatur sebelumnya mencatat bahwa perusahaan umumnya hanya memusatkan perhatian pada pencapaian laba maksimal, sehingga banyak di antaranya mengalihkan sumber daya yang diperoleh untuk investasi tambahan dan mungkin kurang tertarik untuk menanamkan modal pada CSR. Dalam menyusun strategi CSR, perusahaan cenderung menyesuaikan alokasi asetnya dengan mengabaikan aspek nilai-nilai sosial yang dimilikinya (Arora & Dharwadkar, 2011; Nurhandika & Manalu, 2023). Namun menurut Mohammadi et al. (2021) pelanggan cenderung membeli produk dari perusahaan yang memegang standar moral dan sosial yang tinggi.

Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa komite CSR, kepemilikan manajemen, dan ukuran bisnis memberikan pengaruh positif terhadap pelaporan CSR (Adel et al., 2019; Nurhandika & Rahim, 2020). Penelitian lain dari Bhaduri et al. (2016), Khan et al. (2013), Nurhandika & Hamzah, (2019), Sun et al. (2012) menguji *corporate governance* berpengaruh terhadap tingkat CSR tertentu. Para peneliti dalam literatur menyimpulkan bahwa mekanisme tata kelola memiliki dampak positif terhadap pengungkapan CSR. Namun, terkadang pengungkapan CSR dapat dimanfaatkan untuk menyembunyikan perilaku oportunistik dari manajer dengan tujuan untuk memperoleh perhatian dari pemegang saham (Bédard et al., 2008; Mohammadi et al., 2021).

Berbagai negara di dunia dengan beragam karakteristik lingkungan politik telah mengkaji secara mendalam mengenai keterikatan politik di kegiatan bisnis perusahaan (Bliss & Gul, 2012; Houston et al., 2014; Joni et al., 2020). Pernyataan mengenai hubungan antara afiliasi politik dan CSR memiliki latar belakang teori yang dibangun termasuk *Resource Dependency Theory* dan *Social Exchange Theory* (Selin et al., 2023). Menurut Pfeffer & Gerald (1978) *Resource Dependency Theory* (RDT) menyatakan sebuah organisasi yang terbuka sistemnya sangatlah bergantung pada faktor-faktor luar. *Social Exchange Theory* (SET) menyatakan bahwa hubungan keterikatan antara individu, kelompok atau organisasi yang terlibat didalamnya memiliki ganjaran atau timbal balik kedepannya (Tee, 2020). Perusahaan-perusahaan yang berafiliasi secara politik memiliki keistimewaan daripada pesaing mereka dalam menjalankan bisnis karena mereka memperoleh perlakuan istimewa dari pemerintah (K. J. Lin et al., 2015; Nurhandika, 2023; Selin et al., 2023). Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Selin et al. (2023) menunjukkan bahwa di Indonesia, sejumlah perusahaan telah membentuk hubungan politik yang dapat berdampak maupun tidak berdampak secara langsung.

Afiliasi politik yang berbeda memengaruhi hasil keuangan di Malaysia (Wong & Hooy, 2018). Menurut Joni et al. (2020), keterkaitan perusahaan dengan politik baik itu melalui anggota militer maupun profesional berdampak pada penurunan biaya modal di Indonesia. Menurut Phan et al. (2020) perusahaan yang memiliki hubungan dengan pemerintah lebih banyak modal investasinya daripada perusahaan dengan ikatan politik melalui bisnis keluarga mereka. Menurut Chaney et al. (2011) pemerintah dan pihak luar cenderung lebih memberikan perhatian khusus kepada perusahaan dengan koneksi politik yang kuat. Selanjutnya, Tee (2020) mengatakan bahwa ikatan politik cenderung menjadi sumber utama masalah keagenan bagi pemegang saham. Sehingga kecenderungan politik diduga memberikan dampak kepada pendapatan yang rendah dan pelaporan yang kurang akurat (Pozzoli et al., 2022; Yudhanti & Tjahjadi, 2021). Oleh karena itu orang atau perusahaan yang memiliki afiliasi menikmati keuntungannya imbas dari hubungan privat mereka, namun hal tersebut tidak terlepas dari hubungan timbal balik agar perusahaan mengakomodasi aturan-aturan pemerintah (Selin et al., 2023). Perusahaan-perusahaan yang berafiliasi secara politik memiliki keistimewaan daripada pesaing mereka dalam menjalankan bisnis karena mereka memperoleh perlakuan istimewa dari pemerintah (K. J. Lin et al., 2015; Selin et al., 2023). Menurut (Bianchi et al., 2019; Qian & Chen, 2021) terjadi peningkatan pengungkapan CSR pada saat perusahaan memiliki intervensi politik yang besar selama kepentingan pemerintah sedang berjalan seperti pemilu atau kampanye yang menguntungkan bagi pemerintah. Singkatnya secara studi empiris membuktikan perusahaan yang memiliki hubungan politik memiliki akses lebih untuk pinjaman di bank daripada perusahaan yang tidak memiliki hubungan politik sama sekali (Khwaja & Mian, 2005). Mereka juga memiliki keuntungan perpajakan (Wu et al., 2012) dan nilai perusahaan yang baik (Faccio & Parsley, 2006). Sehingga, koneksi politik baik ditingkat direktur atau komisaris diduga dapat mempengaruhi CSR. Berdasarkan kajian pustaka dan gap penelitian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari direksi dan komisaris yang berafiliasi politik terhadap tanggung jawab sosial perusahaan di sektor D yaitu *consumer non-cyclicals* dari periode 2017-2022. Peneliti berkeyakinan bahwa penelitian ini masih perlu dilakukan karena masih sedikit mengkaji mengenai afiliasi politik terhadap tanggung jawab perusahaan hal tersebut dibuktikan dengan gap riset yang ada dan pengembangan dari penelitian (Selin et al., 2023).

KAJIAN PUSTAKA

Pernyataan mengenai hubungan afiliasi politik dan CSR didasarkan pada landasan teori antara lain *Resource Dependency Theory* dan *Social Exchange Theory* (Selin et al., 2023). *Resource Dependency Theory* (RDT) menekankan bahwa organisasi terbuka sangat bergantung pada faktor eksternal (Pfeffer & Gerald, 1978). Sedangkan *Social Exchange Theory* (SET) menyatakan bahwa hubungan ketergantungan antar individu, kelompok atau organisasi yang terlibat melibatkan pertukaran timbal balik di masa depan (Dwekat et al., 2020; Tee, 2020). Perusahaan

yang memiliki afiliasi politik mendapatkan keunggulan dibandingkan pesaingnya dalam menjalankan bisnis karena mendapat perlakuan istimewa dari pemerintah (K. J. Lin et al., 2015; Selin et al., 2023). Hasil penelitian yang dilakukan (Selin et al., 2023) menunjukkan bahwa di Indonesia, sejumlah perusahaan telah menjalin hubungan politik yang mungkin berdampak langsung atau tidak.

Pengaruh afiliasi dewan komisaris terhadap tanggung Jawab Sosial Perusahaan

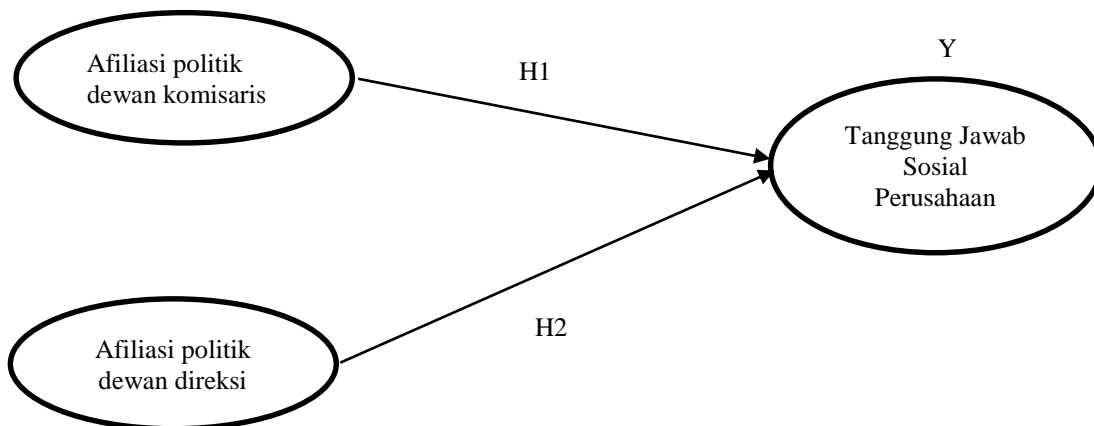
Dewan komisaris merupakan komponen yang mendukung dan mengawasi kegiatan perusahaan agar sesuai aturan yang ada (Sulistiyawati & Qadriatin, 2018). Semakin kuat dewan komisaris pada perusahaan akan berdampak pada kualitas pelaporan secara keuangan atau non-keuangan yang dikeluarkan perusahaan (Nurhandika, 2023; Sulistiyawati & Qadriatin, 2018; Wijayani et al., 2019). Menurut (Bianchi et al., 2019; Selin et al., 2023) kehadiran anggota dewan yang memiliki afiliasi politik memberikan dampak positif terhadap kualitas laporan keberlanjutan karena kehadirannya membuat perusahaan mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

H1: Afiliasi Politik Dewan Komisaris Memiliki Pengaruh Terhadap Tanggung Jawan Sosial Perusahaan

Pengaruh afiliasi dewan direksi terhadap tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Dewan direksi bertugas untuk menjalankan kegiatan bisnis perusahaan dan menciptakan tata kelola perusahaan yang baik (Nurhandika & Hamzah, 2019). Menurut (Selin et al., 2023) kehadiran dewan direksi yang memiliki hubungan dengan pemerintah mampu menyeleraskan atau menjadi agen perubahan pada aturan pemerintah tentang pelaporan tanggung jawab sosial. Hal tersebut didukung juga dengan penelitian dari (Phan et al., 2020; Qian & Chen, 2021) bahwa pengaruh dari afiliasi politik perusahaan ditingkatan direktur berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut (Bianchi et al., 2019) perusahaan dengan afiliasi politik pada tingkatan jabatan diperusahaan meningkatkan pelaporan tanggung jawab perusahaan dengan baik.

H2: Afiliasi Dewan Direksi Memiliki Pengaruh Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan



Sumber: (Bianchi et al., 2019; Qian & Chen, 2021; Selin et al., 2023)

Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Penelitian kami menguji model menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar pada *Indonesia Stock Exchange Industrial Classification* sektor D yaitu *consumer non-cyclicals* dari periode 2017-2022. Kami menghimpun data melalui datasream website www.esgi.ai. Selanjutnya kami mengeliminasi agar menemukan data yang ideal untuk penelitian ini menggunakan beberapa karakteristik pengambilan sampel antara lain: pertama seluruh perusahaan kecuali perusahaan keuangan, kedua perusahaan yang tidak lengkap data untuk penelitian ini, ketiga perusahaan yang terdisbusi hubungan politik (direktur dan komisaris). Kami juga menggunakan software STATA sebagai alat analisis statistiknya.

Pada penelitian ini ada dua variabel yang di masukan yaitu pertama, variabel dependen diukur berdasarkan kerangka *Global Reporting Initiative* (GRI) G4 yang baik dalam mengukur CSR (Uyar et al., 2023). Sehingga didapat perhitungan jumlah dari item yang diungkap dibagi dengan jumlah dimensi kriteria GRI (Chakroun et al., 2022; Firmansyah et al., 2022). Kedua variabel independen yaitu mengukur dengan merujuk penelitian K. Z. Lin et al. (2018) yaitu logaritma natural dari jumlah orang yang memilki afiliasi politik di perusahaan baik direktur maupun komisaris.

Penelitian ini menggunakan model sebagai berikut

$$CSRscore = \beta_0 + \beta_1 POLIKOM + \beta_2 POLIDIR + \dots \dots \dots (1)$$

Dimana ; β untuk koefisien regresi; POLIKOM merupakan komisaris yang berafiliasi politik; POLIDIR merupakan direktur yang berafiliasi politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analaisis Statistic deskripsi menunjukkan karakteristik distribusi data, seperti nilai minimum, nilai maximum, mean, dan standar deviasi.

Tabel 1 Statistik Deskriptif

| Variabel | Mean | Std Dev. | Min | Max |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|
| CSR | .616383 | .175595 | .18045 | 1 |
| x1polikom | .9692437 | .2564553 | .6931472 | 1.609438 |
| x2polidir | .9626806 | .2423187 | .6931472 | 1.386294 |
| Jumlah observasi 102 | | | | |

Sumber: Data Diolah, 2023

Statistik deskripsi dapat dilihat pada table 1. Corporate Social Responsibility (CSR), POLIKOM merupakan komisaris yang berafiliasi politik; POLIDIR merupakan direktur yang berafiliasi politik mengungkapkan variasi data minimum dan maksimum. Terlihat nilai mean lebih besar daripada nilai standar deviasi.

Tabel 2 Uji Multikolinearitas

| Variabel | VIF | 1/VIF |
|-----------|------|----------|
| x1polikom | 7.87 | 0.127118 |
| x2polidir | 7.87 | 0.127118 |
| Mean VIF | 7.87 | |

Sumber: Data Diolah, 2023

Korelasi data dapat dilihat pada table 2. komisaris yang berafiliasi politik (POLIKOM) dan direktur yang berafiliasi politik (POLIDIR) mengungkapkan bahwa nilai VIF kurang dari 10 dan nilai 1/VIF lebih dari 0.01 maka dapat diartikan menurut Ghozali (2016) seluruh variable pada penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Table 3 Hasil Uji Hipotesis

| Variabel | CSRscore (sig 0,05) | |
|-----------|---------------------|--------|
| | koef | Pvalue |
| Model 1 | | |
| Konstanta | .5212154 | |
| x1polikom | .1630858 | 0.046 |
| x2polidir | .2653407 | 0.054 |
| R-squared | 0.747 | |

Sumber: Data Diolah, 2023

Pengaruh Afiliasi Politik Dewan Komisaris Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pada tabel 3 dapat dijelaskan uji hipotesis. Nilai koefisien dan signifikansi afiliasi politik dewan komisaris terhadap skor CSR adalah .1630858 dan 0.046 mengungkapkan bahwa variable dewan komisaris berafiliasi politik berpengaruh secara positif terhadap skor CSR. Hal tersebut membenarkan bahwa pengaruh politik pada dewan komisaris berdampak pada peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan hal ini dibuktikan dengan argumentasi dari penelitian K. J. Lin et al. (2015) dan Selin et al. (2023) yang menyatakan secara *Resource Based Theory* keunggulan perusahaan dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan non-keuangan ada pada sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan baik secara materi maupun secara relasi. Menurut Bianchi et al. (2019) dan Qian & Chen (2021) terjadi peningkatan pengungkapan CSR pada saat perusahaan memiliki intervensi politik yang besar selama kepentingan pemerintah sedang berjalan seperti pemilu atau kampanye yang menguntungkan bagi pemerintah.

Pengaruh Afiliasi Politik Direktur Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pada tabel 3 Nilai koefisien dan signifikansi afiliasi politik dewan direktur terhadap skor CSR adalah .2653407 dan 0.054 mengungkapkan bahwa variable dewan direktur berafiliasi politik tidak berpengaruh terhadap skor CSR. Hal tersebut menyatakan bahwa afiliasi pada tingkatan direktur tidak mempengaruhi keputusan meskipun adanya kekuatan politik yang menekan. sesuai dengan penelitian Wong & Hooy (2018) yang menyatakan bahwa direktur mampu memberikan efek yang tidak berpengaruh pada saat tingkatan direktur tersebut mereduksi informasi-informasi yang tidak berhubungan dengan peningkatan kualitas pelaporan keuangan maupun non-keuangan pada perusahaannya. Menurut Joni et al. (2020), keterkaitan perusahaan dengan politik baik itu melalui anggota militer maupun profesional berdampak pada penurunan biaya modal di Indonesia. Menurut K. J. Lin et al. (2015) *Resource Based Theory* memiliki pandangan bahwa direktur pada tingkatan perusahaan harus mampu mereduksi kepentingan yang tidak baik melalui integritas dengan modal yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan pelatihan atau mengikuti seminar mengenai kualitas pelaporan keuangan atau non-keuangan yang baik, karena dengan begitu direktur mampu menunjukkan bahwa keputusannya berdampak pada kepentingan bersama.

PENUTUP

Penelitian ini menemukan variabel dewan komisaris berafiliasi politik berpengaruh positif terhadap skor tanggung jawab social perusahaan. hal itu membuktikan bahwa perusahaan masih memiliki kecenderungan jika memiliki kedekatan dengan pihak atau profesional yang berafiliasi politik akan mendapatkan keuntungan seperti perpajakan dan nilai perusahaan yang baik daripada pesaing yang tidak memiliki profesional yang berafiliasi politik di perusahaannya. Variabel dewan direksi berafiliasi politik tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat skor CSR. Hal tersebut membuktikan komitmen dewan direktur untuk memberikan informasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan agar investor memberikan investasinya kepada perusahaan. penelitian ini berkontribusi untuk memberikan gambaran bagaimana perusahaan atau praktisi menyikapi koneksi politik dapat selaras dengan tingkat nilai CSR dengan memperhatikan keadaan sosial seperti terjadinya covid-19, pemilu, dan hal lain yang menyangkut aturan-aturan baru pemerintah tentang pertanggungjawaban sosial. Penelitian ini tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan pertama adalah data yang diambil masih pada satu sektor saja mungkin penelitian selanjutnya menggunakan sektor lain agar mampu menggambarkan keadaan disektor lain atau sebagai pembanding, kedua penelitian ini masih pada dua variabel independen yang belum mencerminkan keseluruhan koneksi politik mungkin penelitian selanjutnya menambahkan lebih spesifik koneksi politik seperti militer dan mantan menteri.

DAFTAR PUSTAKA

- About, A., & Yang, X. (2022). Corporate governance and corporate social responsibility: new evidence from China. *International Journal of Accounting & Information Management*.
- Adel, C., Hussain, M. M., Mohamed, E. K. A., & Basuony, M. A. K. (2019). Is corporate governance relevant to the quality of corporate social responsibility disclosure in large European companies? *International Journal of Accounting & Information Management*.
- Arora, P., & Dharwadkar, R. (2011). Corporate governance and corporate social responsibility (CSR): The moderating roles of attainment discrepancy and organization slack. *Corporate Governance: An International Review*, 19(2), 136–152. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2010.00843.x>
- Bédard, J., Coulombe, D., & Courteau, L. (2008). Audit committee, underpricing of IPOs, and accuracy of management earnings forecasts. *Corporate Governance: An International Review*, 16(6), 519–535.
- Bhaduri, S. N., Selarka, E., Bhaduri, S. N., & Selarka, E. (2016). Impact of corporate governance on corporate social responsibility in india—empirical analysis. *Corporate Governance and Corporate Social Responsibility of Indian Companies*, 87–113.
- Bianchi, M. T., Monteiro, P., Azevedo, G., Oliveira, J., Viana, R. C., & Branco, M. C. (2019). Political connections and corporate social responsibility reporting in Portugal. *Journal of Financial Crime*, 26(4), 1203–1215.
- Bliss, M. A., & Gul, F. A. (2012). Political connection and cost of debt: Some Malaysian evidence. *Journal of Banking & Finance*, 36(5), 1520–1527.
- Chakroun, S., Ben Amar, A., & Ben Amar, A. (2022). Earnings management, financial performance and the moderating effect of corporate social responsibility: evidence from France. *Management Research Review*, 45(3), 331–362.
- Chaney, P. K., Faccio, M., & Parsley, D. (2011). The quality of accounting information in politically connected firms. *Journal of Accounting and Economics*, 51(1), 58–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.07.003>
- Dwekat, A., Seguí-Mas, E., Tormo-Carbó, G., & Carmona, P. (2020). Corporate governance configurations and corporate social responsibility disclosure: Qualitative comparative analysis of audit committee and board characteristics. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 27(6), 2879–2892.
- Faccio, M., & Parsley, D. C. (2006). *Sudden deaths: Taking stock of political connections*.
- Firmansyah, A., Arham, A., Qadri, R. A., Wibowo, P., Irawan, F., Kustiani, N. A., Wijaya, S., Andriani, A. F., Arfiansyah, Z., & Kurniawati, L. (2022). Political connections, investment opportunity sets, tax avoidance: does corporate social responsibility disclosure in Indonesia have a role? *Heliyon*.
- García-Sánchez, I., Hussain, N., Khan, S., & Martínez-Ferrero, J. (2022). Assurance of corporate social responsibility reports: Examining the role of internal and external corporate governance mechanisms. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 29(1), 89–106.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate SPSS 23* (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gupta, A., Briscoe, F., & Hambrick, D. C. (2017). Red, blue, and purple firms: Organizational political ideology and corporate social responsibility. *Strategic Management Journal*, 38(5), 1018–1040.
- Houston, J. F., Jiang, L., Lin, C., & Ma, Y. (2014). Political connections and the cost of bank loans. *Journal of Accounting Research*, 52(1), 193–243.
- Jiao, J., Liu, C., Xu, Y., & Hao, Z. (2022). Effects of strategic flexibility and organizational slack on the relationship between green operational practices adoption and firm performance. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 29(3), 561–577.
- Joni, J., Ahmed, K., & Hamilton, J. (2020). Politically connected boards, family business groups

- and firm performance: evidence from Indonesia. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 16(1), 93–121.
- Khan, A., Muttakin, M. B., & Siddiqui, J. (2013). Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosures: Evidence from an Emerging Economy. *Journal of Business Ethics*, 114(2), 207–223. <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1336-0>
- Khwaja, A. I., & Mian, A. (2005). Do lenders favor politically connected firms? Rent provision in an emerging financial market. *The Quarterly Journal of Economics*, 120(4), 1371–1411.
- Lin, K. J., Tan, J., Zhao, L., & Karim, K. (2015). In the name of charity: Political connections and strategic corporate social responsibility in a transition economy. *Journal of Corporate Finance*, 32, 327–346.
- Lin, K. Z., Mills, L. F., Zhang, F., & Li, Y. (2018). Do political connections weaken tax enforcement effectiveness? *Contemporary Accounting Research*, 35(4), 1941–1972.
- Mohammadi, S., Saeidi, H., & Naghshbandi, N. (2021). The impact of board and audit committee characteristics on corporate social responsibility: evidence from the Iranian stock exchange. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 70(8), 2207–2236.
- Nurhandika, A. (2023). HOW DOES THE ROLE OF POLITICAL CONNECTIONS INFLUENCE THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SCORES. *International Journal of Management, Economic, Business and Accounting*, 2(3), 14–22.
- Nurhandika, A., & Hamzah, A. (2019). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Dampaknya Pada Nilai Perusahaan. *Sosio E-Kons*, 11(3), 249–258.
- Nurhandika, A., & Manalu, V. G. (2023). How political connection moderate audit committee characteristics and csr: evidence from Indonesian companies. *Jurnal Mantik*, 7(3), 1653–1660.
- Nurhandika, A., & Rahim, F. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Jurnal Perspektif*, 4(2), 66–81.
- Pfeffer, J., & Gerald, R. (1978). *Salancik. 1978. The external control of organizations: A resource dependence perspective*. New York: Harper & Row.
- Phan, D. H. B., Tee, C. M., & Tran, V. T. (2020). Do different types of political connections affect corporate investments? Evidence from Malaysia. *Emerging Markets Review*, 42, 100667. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ememar.2019.100667>
- Pozzoli, M., Pagani, A., & Paolone, F. (2022). The impact of audit committee characteristics on ESG performance in the European Union member states: Empirical evidence before and during the COVID-19 pandemic. *Journal of Cleaner Production*, 371, 133411.
- Qian, W., & Chen, X. (2021). Corporate environmental disclosure and political connection in regulatory and leadership changes: The case of China. *The British Accounting Review*, 53(1), 100935.
- Rianda, H. (2023). Aspek Hukum Tindak Pidana Kasus Penggelapan Dana Bantuan Sosial. *Khazanah Multidisiplin*, 4(2), 315–328.
- Selin, M., Joni, J., & Ahmed, K. (2023). Political affiliation types and corporate social responsibility (CSR) commitment: Evidence from Indonesia. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 19(1), 24–39.
- Sulistiyawati, A. I., & Qadriatin, A. (2018). Pengungkapan Sustainability Report Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. *SOLUSI: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(4), 1–22. <https://doi.org/10.47200/jcob.v3i1.669>
- Sun, Y., Yi, Y., & Lin, B. (2012). Board independence, internal information environment and voluntary disclosure of auditors' reports on internal controls. *China Journal of Accounting Research*, 5(2), 145–161.
- Tee, C. M. (2020). Political connections and income smoothing: Evidence of institutional investors' monitoring in Malaysia. *Journal of Multinational Financial Management*, 55, 100626. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2020.100626>
- Uyar, A., Elbardan, H., Kuzey, C., & Karaman, A. S. (2023). Audit and CSR committees: are they complements or substitutes in CSR reporting, assurance and GRI framework

- adoption? *International Journal of Accounting & Information Management*, 31(1), 1–36.
- Wijayani, D. R., Budiman, N. A., & Mulyani, S. (2019). PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP VOLUNTARY DISCLOSURE (Study kasus Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2017). *Solusi*, 17(4), 45–62. <https://doi.org/10.26623/slsi.v17i4.1772>
- Wong, W. Y., & Hooy, C. W. (2018). Do types of political connection affect firm performance differently? *Pacific Basin Finance Journal*, 51, 297–317. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2018.08.009>
- Wu, W., Wu, C., Zhou, C., & Wu, J. (2012). Political connections, tax benefits and firm performance: Evidence from China. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(3), 277–300.
- Yudhanti, C. B. H., & Tjahjadi, B. (2021). Drivers of social responsibility disclosure: the moderation of the president director's busyness and political connections. *Asian Journal of Accounting Research*.